



**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah)**

Mudjiyono¹

Yetti Iswahyuni²

Akuntansi, STIE AKA Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Maret 2019

Disetujui: 5 Mei 2019

Dipublikasikan: 1 Agustus 2019

Keywords:

Presentation of financial statements, Accessibility of regional financial reports, Accounting information systems, Accountability of regional financial management.

ABSTRAK

Pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal maupun internal. Laporan yang disusun harus komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kemampuan yang beragam antar daerah. Hampir sebagian besar pemerintah daerah memperoleh persentase di bawah 50% artinya bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan kurang mampu mengungkapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi beberapa pemerintah daerah karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut. Sampel yang memenuhi syarat sebanyak 51 responden yang menjadi pelaksana pengelolaan keuangan langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bukti empiris bahwa: 1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

ABSTRACT

The government is required to make financial reports that are useful for users of external and internal financial statements. The prepared report must be comprehensive as a form of accountability that will be examined by the Supreme Audit Agency (BPK). The results of previous studies related to the effect of the presentation of regional financial statements and the accessibility of financial statements to the accountability of regional financial management showed diverse capabilities among regions. Most of the regional governments obtain a percentage below 50%, which means that the presentation of regional financial statements and accessibility of financial statements is less able to express accountability in regional financial management. This has become a problem for some local governments because the systems and reporting that have been there have not been conducive in this direction. Samples that met the requirements were 51 respondents who were executors of financial management directly at the Regional Work Unit of the Central Java Provincial Government. The sampling technique in this study used purposive sampling. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. The test results show empirical evidence that: 1. The presentation of financial statements significantly influences the accountability of regional financial management. 2. Accessibility of regional financial reports does not significantly influence the accountability of regional financial management. 3. Accounting information systems significantly influence the accountability of regional financial management..

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal maupun internal. Laporan yang disusun harus komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Implikasi dari penyusunan laporan keuangan pemerintah yang komprehensif adalah laporan keuangan yang disusun bersifat transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan (pusat dan daerah). Pemerintah harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan tersebut.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah menunjukkan kemampuan yang beragam antar daerah. Hampir sebagian besar pemerintah daerah memperoleh persentase di bawah 50% artinya bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan kurang mampu mengungkapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi beberapa pemerintah daerah karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut (Halim (2002) dalam Mulyana (2006)). Ini yang menjadi latar belakang penelitian. Kemudian peneliti menambahkan satu variabel yaitu sistem akuntansi keuangan daerah seperti pada penelitian Superdi (2017), Handri, Rifa dan Rahmawati (2014), Lily (2015), Patra, Bustami dan Hasriani (2015), Perdhiansyah (2016), Kurnia (2013), dan Hidayat (2015).

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Adapun yang menjadi sampel adalah 51 responden yang menjadi pelaksana pengelolaan keuangan langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pelaksana pengelolaan keuangan langsung antara lain:

1. Kepala SKPD
2. Kepala bagian keuangan
3. Pelaksana teknis kegiatan (PPTK)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Dari 70 responden yang memenuhi syarat hanya 51 responden yang mengembalikan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah *five point likert-scale* kuesioner.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen yang digunakan adalah penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah).

Tabel 3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator pengukuran variabel
1.	Penyajian laporan keuangan	<p>Relevan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan yang dihasilkan memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 2. Instansi/lembaga tempat bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. 3. Instansi/lembaga tempat bekerja menyelesaikan laporan keuangan secara lengkap. <p>Andal</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Transaksi yang disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan. 5. Informasi yang disajikan bebas dari kesalahan yang bersifat material. 6. Menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus. 7. Informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji.

<p>2.</p>	<p>Aksesibilitas laporan keuangan daerah</p>	<p>Dapat dibandingkan 8. Informasi keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dapat dipahami 9. Informasi keuangan yang disajikan dipahami oleh pengguna. Sumber: kuesioner penelitian Perdhiansyah (2016). Terbuka di media massa 1. Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa. Mudah diakses 2. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>). Ketersediaan informasi 3. Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah. Sumber: kuesioner penelitian Sande (2013).</p>	<p>4.</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>8. Bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada. 9. Laporan keuangan yang disajikan dihasilkan dari sistem informasi yang benar. Teknologi jaringan komunikasi (<i>communication network technology</i>) 10. Pengelola keuangan atau akuntansi telah memanfaatkan jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan. Sumber: kuesioner penelitian Perdhiansyah (2016). Akuntabilitas program 1. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. 2. Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. 3. Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 4. Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat waktunya ke kas daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. 5. Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Akuntabilitas proses 6. Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan ke BPK. Akuntabilitas kebijakan 7. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. 8. Dilakukannya <i>financial audit</i> terhadap laporan keuangan daerah. Sumber: kuesioner penelitian Sande (2013).</p>
<p>3.</p>	<p>Sistem Informasi Akuntansi</p>	<p>Perangkat keras (<i>hardware</i>) 1. Pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer. 2. Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi. Perangkat lunak (<i>software</i>) 3. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan. Manusia (<i>brainware</i>) 4. Telah mendapatkan pelatihan untuk dapat menunjang kemampuan bekerja di bidang akuntansi. 5. Memahami pelatihan yang diberikan. 6. Memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi. Prosedur (<i>procedure</i>) 7. Menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi.</p>			

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode angket sehingga instrumen penelitiannya adalah kuesioner atau skala bertingkat. Berkaitan dengan instrumen tersebut maka dinyatakan baik jika memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji hipotesis dan uji regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Jadi H1 diterima.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi 0,317 lebih besar dari 0,05 dengan demikian variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Jadi H2 ditolak.

Variabel sistem informasi akuntansi memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Jadi H3 diterima.

Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,003 yang berarti penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut peneliti variabel penyajian laporan keuangan yang mengharuskan prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

seperti yang tertuang dalam indikator variabel independen telah dapat dipenuhi dan ditaati dalam rangka penyajian laporan keuangan SKPD Propinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lewier dan Kurniawan (2016) di Kabupaten Klaten. Saputra, Ardi Rahmawan (2012) di Kabupaten Banjarnegara. Aliyah dan Nahar (2012) di Kabupaten Jepara. Nurlaili (2016) di Kabupaten Bengkalis. Fauziyah, Miftahul Reza (2017) di Kota Surabaya. Hehanussa, Salomi J (2015) di Kota Ambon. Mustofa, Anies Iqbal (2012) di Kabupaten Pematang. Sumiyati (2015) di Kabupaten Rakon Hilir. Sande, Peggy (2013) di Provinsi Sumatera Barat. Superdi (2017) di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Handri, Rifa dan Rahmawati (2014) di Kota Padang. Lily (2015) di Kota Payakumbuh. Kurnia, Indra (2013) di Propinsi Sumatera Barat. Hidayat, Rahmad (2015) di Kabupaten Padang Pariaman. Sukhemi (2013) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Frans (2011) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasandutan dan Kabupaten Samosir. Sastra, Yuni (2013) meneliti di Kota Medan.

Hampir semua peneliti sepakat bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,317 yang berarti aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut peneliti variabel aksesibilitas laporan keuangan yang mengharuskan laporan

keuangan daerah terbuka di media massa, mudah diakses dan menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti yang tertuang dalam indikator variabel independen belum dapat dipenuhi dan ditaati. Hal ini karena pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) belum melakukan audit terhadap semua laporan keuangan SKPD yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Untuk melakukan audit pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) membutuhkan waktu sehingga pada saat penelitian ini terlaksana belum semua laporan SKPD Propinsi Jawa Tengah tersaji secara terbuka di internet (*website*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sastra (2013) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam Sumiyati (2015) menyatakan bahwa perbedaan ini dikarenakan hasil jawaban responden yang berbeda, namun alasan lebih detail tidak diungkapkan.

Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut peneliti variabel sistem informasi akuntansi yang mengharuskan pemakaian perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manusia (*brainware*), prosedur dan teknologi jaringan komunikasi seperti yang tertuang dalam indikator variabel independen telah dapat dipenuhi dan ditaati dalam rangka penyajian laporan keuangan SKPD Propinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Superdi (2017) di SKPD Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Handri, Rifa dan Rahmawati (2014) di Pemerintah Kota Padang, Lily (2015) di Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh. Patra, Bustami dan Hasriani (2015) di Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu, Perdhiansyah (2016) di Pegawai Kantor BP3TKI Pontianak, Kurnia (2013) di Propinsi Sumatera Barat, Hidayat (2015) di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 1. Hasil Uji Heterosdaskisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1.003	.396		2.534	.015
	x1	.302	.097	.350	3.123	.003
	x2	-.066	.065	-.098	-1.012	.317
	x3	.532	.114	.559	4.661	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data SPSS 23, tahun (2018)

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian menunjukkan bukti empiris bahwa:

1. Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,003 yang berarti penyajian laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut peneliti variabel penyajian laporan keuangan yang mengharuskan prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami seperti yang tertuang dalam indikator variabel independen telah dapat dipenuhi dan ditaati dalam rangka penyajian laporan keuangan SKPD Propinsi Jawa Tengah.
2. Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,317 yang berarti aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut peneliti variabel aksesibilitas laporan keuangan yang mengharuskan laporan keuangan daerah terbuka di media massa, mudah diakses dan menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti yang tertuang dalam indikator variabel independen belum dapat dipenuhi dan ditaati. Hal ini karena pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) belum melakukan audit terhadap semua laporan keuangan SKPD yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Untuk melakukan audit pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) membutuhkan waktu sehingga pada saat penelitian ini terlaksana belum semua laporan SKPD Propinsi Jawa Tengah tersaji secara terbuka di internet (*website*). Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Sastra (2013) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam Sumiyati (2015) menyatakan bahwa perbedaan ini dikarenakan hasil jawaban responden yang berbeda, namun alasan lebih detail tidak diungkapkan.

3. Hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut peneliti variabel sistem informasi akuntansi yang mengharuskan pemakaian perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manusia (*brainware*), prosedur dan teknologi jaringan komunikasi seperti yang tertuang dalam indikator variabel independen telah dapat dipenuhi dan ditaati dalam rangka penyajian laporan keuangan SKPD Propinsi Jawa Tengah.

Keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan sampel yang hanya terfokus pada SKPD Propinsi Jawa Tengah.
2. Hanya terbatas pada tiga variabel independen, yaitu: penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem informasi akuntansi. Sedangkan masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner, yaitu: terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak

menunjukkan keadaan
sesungguhnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan adalah:

1. Agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti maka penelitian selanjutnya seharusnya memperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperluas objek penelitian. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah dan Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol.8, No.2: 137-150.
- Fauziah, Miftahul Reza. 2017. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6, No.6.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon, *Jurnal Unissula*, Vol.2, No.1: 82-90.
- Hidayat, Rahmat. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman), *Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang*.
- Kurnia, Indra. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). *Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang*.
- Lewier dan Kurniawan. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Ringkasan Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Lily. 2015. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh), *Jom FEKON*, Vol.2, No.2: 1-15.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang, *Accounting Analysis Journal*, Vol.1, No.1: 1-6.
- Nurlaili. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Bengkalis), *Jom FEKON*, Vol.3, No.1: 449-461.
- Patra, Bustami dan Hasriani. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.1: 1-9.
- Perdhiansyah. 2016. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi: Kantor BP3TKI Pontianak), *Artikel Ilmiah Universitas Tanjungpura*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Ringkasan Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatera Utara.
- Saputra, Ardi Rahmawan. 2012. Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah, *Accounting Analysis Journal*, Vol.1, No.2: 1-5.
- Setyaningrum, Dyah. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.9, No.2: 154-170.

- Sukhemi. 2013. Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.10, No.1: 286-293.
- Sumiyati. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir), Jom FEKON, Vol.2, No.2: 1-15.
- Superdi. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung), JOM Fekon, Vol.4, No.1: 2015-2029.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

www.iaiglobal.or.id